



## **KATA PENGANTAR**

***Bismillahirrahmanirrahim,***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengemban amanat pembangunan daerah. LKPJ menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memandang bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat tingkat keberhasilannya, obyektif dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya.

Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Tahun 2023 menggambarkan hasil kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dengan ruang lingkup substansi mencakup: hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, Penugasan dan Kebijakan Strategis selama TA. 2023 serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah TA. 2022, dan secara lengkap telah tersaji dalam buku ini.

Berbagai prestasi pembangunan di tahun 2023 yang telah dihasilkan yaitu 211 penghargaan, dengan rincian 117 penghargaan dari urusan wajib pelayanan dasar, 38 penghargaan dari urusan wajib bukan pelayanan dasar, 36 penghargaan dari urusan pilihan dan 11 penghargaan dari fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan 9 penghargaan pada unsur pendukung urusan pemerintahan.

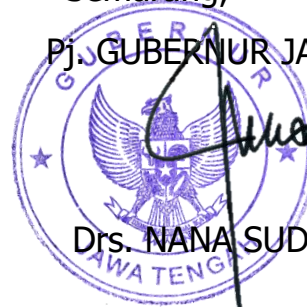
Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada tahun 2023 merupakan wujud implementasi inovasi serta kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah secara luas. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran, dan masukan DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jawa Tengah pada masa yang akan datang menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari dalam mengemban amanat masyarakat.

Terima kasih

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Semarang, Maret 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, M.M.

### 3.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan strategis yang menjadi komitmen urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah meliputi Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, Menjaga Jalan Provinsi agar tetap dalam kondisi baik, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional, Meningkatkan keandalan kualitas Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD), Penyelenggaraan Fasilitas Bidang Jasa Konstruksi, Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Dalam mendukung program tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 Balai Pengelolaan Jalan Wilayah (Tegal, Cilacap, Semarang, Magelang, Wonosobo, Pati, Surakarta, Purwodadi, dan Pekalongan); Balai Pengujian dan Peralatan; serta Balai jasa Konstruksi.

Air baku menjadi awal dari proses penyediaan dan pengolahan air bersih sehingga sumber air baku memegang peranan penting dalam segala sektor kehidupan. Faktor perubahan iklim global, degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA), perubahan tata guna lahan, serta limbah cair dan padat dari pemukiman atau industri mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air permukaan untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Jawa Tengah. Laju sedimentasi yang tinggi mengurangi kapasitas penyimpanan air pada sungai. Jika proses tersebut berlangsung terus menerus dapat menyebabkan genangan air atau bencana banjir.

Berdasarkan kondisi tersebut, Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan penyesuaian substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Sinkronisasi substansi tersebut menjadi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan RTRWP Jawa Tengah dengan mengintegrasikan seluruh aspek, termasuk pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). RZWP3K disusun dengan adanya kolaborasi dari berbagai sektor sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan keseimbangan terhadap ekosistem dan lingkungan.

Penghargaan yang diterima Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang terkait dengan Program Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Peringkat 1 Nasional, Organisasi Perangkat Daerah Yang Membidangi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik Tahun 2023 dari Kementerian PUPR.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 OPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang.

## A. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

### a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran Rp 776.505.410.000,00 melalui 6 program, yaitu

**1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** didukung anggaran Rp96.824.170.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,20%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat capaiannya seluruhnya sangat tinggi yaitu: Persentase akses air minum perkotaan; Persentase akses air minum perdesaan; dan Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. Terhadap capaian akhir RPJMD pada program ini memiliki 2 indikator program dengan tingkat ketercapaiannya sangat tinggi yaitu Persentase akses layak air minum perdesaan dan Persentase akses layak air minum perkotaan. Sedangkan 1 indikator Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota merupakan indikator baru amanat pusat yang tidak masuk dalam target RPJMD.

Permasalahan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah masih rendahnya cakupan layanan air minum bagi masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan ialah mendorong pemanfaatan akses air minum yang sudah terbangun sehingga cakupan layanan air minum bagi masyarakat dapat terpenuhi.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota untuk indikator persentase akses layak air minum perkotaan tersebar di 35 kabupaten/kota dengan capaian tertinggi 100% berada di Kabupaten Kebumen, Brebes, dan Kota Pekalongan serta yang terendah di Kabupaten Purworejo (86,05%); indikator persentase akses layak air minum perdesaan tersebar di 29 Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi di Kabupaten Banjarnegara (96,94%) dan capaian terendah di Kabupaten Cilacap (51,53%);

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah meningkatnya kemudahan akses air minum yang berkelanjutan serta terbangunnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk rasa kepemilikan atas sarana yang terbangun.

**2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** didukung anggaran Rp1.703.600.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,41%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dan RPJMD yaitu Persentase akses sanitasi air limbah domestik

dengan tingkat capaian sangat tinggi (100,69%). Terhadap capaian akhir RPJMD indikator tersebut telah tercapai.

Permasalahan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah di Provinsi Jawa Tengah adalah belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengolahan air limbah domestik. Upaya yang dilakukan ialah inisiasi pembangunan sarpras Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang sedang dalam tahapan pematangan lahan dan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sanitasi sehingga seluruh daerah di Jawa Tengah memiliki akses sanitasi air limbah domestik yang layak dan aman.

Sebaran capaian indikator kinerja di Kabupaten/Kota untuk indikator persentase akses sanitasi air limbah domestik tersebar pada 35 Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi 100% berada di Kabupaten (Klaten, Pati, Demak) dan capaian terendah di Kabupaten Wonosobo (71,61%).

Manfaat program akses sanitasi air limbah domestik adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terkait akses sanitasi yang berkelanjutan serta terbangunnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk rasa kepemilikan atas sarana yang terbangun, sehingga tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah bisa lebih meningkat.

**3) Program Penataan Bangunan Gedung** didukung anggaran Rp110.589.276.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,05%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dan RPJMD yaitu Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar dengan tingkat capaian sangat tinggi (100%). Terhadap capaian akhir RPJMD indikator tersebut telah tercapai.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum seluruh pengelola BGMD memahami aturan penyelenggaraan bangunan gedung negara sesuai standar. Upaya penyelesaiannya adalah dengan mengoptimalkan bimbingan teknis, sosialisasi, serta bantuan teknis kepada OPD penyelenggara BGMD. Manfaat penyelenggaraan Program Penataan Bangunan Gedung adalah BGMD di Provinsi Jawa Tengah memenuhi standar administratif dan teknis sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

**4) Program Penataan Bangunan Lingkungannya** didukung anggaran Rp647.516.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 95,64%. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD yaitu Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%). Indikator tersebut merupakan indikator baru yang tidak masuk dalam target RPJMD.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum seluruh BGMD di Provinsi Jawa Tengah dilakukan penilaian kondisi bangunan sesuai standar. Upaya penyelesaiannya adalah optimalisasi pendataan dan penilaian kondisi BGMD secara bertahap sesuai skala prioritas. Manfaat Penyelenggaraan Program ini adalah terdatanya kondisi BGMD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan prioritas penanganan bangunan dan lingkungannya.

**5) Program Penyelenggaraan Jalan** didukung anggaran Rp456.482.237.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,71%. Program ini memiliki 25 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dan RPJMD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi: Persentase panjang jalan yang dileger; Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan; Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan; Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur; Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat; Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah (Tegal, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Magelang, Wonosobo, Pati, Purwodadi, Surakarta); Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah (Tegal, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Magelang, Wonosobo, Pati, Purwodadi, Surakarta); Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan; dan Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi. Terhadap capaian RPJMD terdapat 17 indikator yang tercapai sedangkan 7 indikator tidak tercapai yaitu di persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan, Cilacap, Semarang, Wonosobo, Pati, dan Surakarta; serta persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta. Terdapat 1 indikator baru yang merupakan amanat pusat dan tidak masuk dalam target RPJMD.

Permasalahan yang dihadapi dalam program penyelenggaraan jalan yaitu masih banyaknya ruas jalan dengan usia melebihi umur rencana yang belum tertangani. Upaya yang dilakukan dengan pengoptimalan kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan agar memenuhi standar jalan kolektor sesuai skala prioritas.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota untuk indikator persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik tersebar pada 31 Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi di Kota Surakarta dan terendah di Kab Demak.

Sebaran capaian indikator kinerja di Kabupaten/Kota untuk indikator persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik yaitu kemantapan jalan tersebar pada 31 Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi (100%) berada di Kota Surakarta, sedangkan capaian terendah (77,09%) di Kabupaten Blora. Untuk persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik tersebar pada 31 Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi

(99,50%) berada di Kabupaten Pati, sedangkan capaian terendah (71,55%) di Kabupaten Cilacap.

Manfaat Program Penyelenggaraan Jalan adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan yang ada di wilayah Jawa Tengah sehingga aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan kelancaran pergerakan sosial ekonomi dan jasa di Jawa Tengah dapat semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta terpeliharanya jalan dan jembatan dengan status kondisi baik serta aman dan nyaman digunakan oleh pengguna jalan, sehingga kelancaran pergerakan sosial dan ekonomi juga dapat terjaga.

**6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi** didukung anggaran Rp2.302.680.000,00, dengan realisasi fisik 100,00% dan keuangan 93,28%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja program yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu: Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi dan Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi. Terhadap capaian akhir RPJMD pada program ini memiliki indikator Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi telah tercapai. Sedangkan indikator Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi merupakan indikator baru amanat pusat yang tidak masuk dalam target RPJMD.

Kendala pada program pengembangan jasa konstruksi adalah belum tercukupinya tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu meningkatnya tenaga kerja terampil yang profesional, mandiri dan berintegritas serta meningkatnya pelayanan yang bertanggung jawab kepada pengguna jasa dan masyarakat pengguna hasil pekerjaan konstruksi sehingga kualitas bangunan/hasil pekerjaan juga lebih terjamin.

Secara keseluruhan Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUBMCK)

No	Program/Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Akhir RPJMD (2018-2023)			Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
<b>I</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>							
1	Persentase akses layak air minum perdesaan	%	83,30	84,22	101,10	83,3	84,22	101,10
2	Persentase akses layak air minum perkotaan	%	94,15	94,15	100,00	94,15	94,15	100
3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab./kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab./Kota	%	-	-	-	100	100	100
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>							
1	Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	91,50	92,14	100,70	91,50	92,14	100,69

No	Program/Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Akhir RPJMD (2018-2023)			Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
<b>III</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>							
1	Persentase jumlah kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	15,23	15,23	100	15,23	15,23	100
<b>IV</b>	<b>Program Penataan Bangunan Lingkungannya</b>							
1	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang diperiksa keandalannya	%	-	-	-	15,23	15,23	100
<b>V</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>							
1	Persentase panjang jalan yang dileger	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perencanaan, pengawasan, dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	-	-	-	100	100	100
4	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	40.13	42,55	106,03	42,42	42,55	100,31
5	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	47.68	48,01	100,69	48,01	48,01	100
6	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	88.43	93,48	105,71	95,73	93,48	97,65
7	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	86.09	86,09	100	86,09	86,09	100
8	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	96.65	90,03	93,15	85,27	90,03	105,58
9	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	88.44	88,44	100	88,44	88,44	100
10	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	91.75	91,64	99,88	95,02	91,64	96,44
11	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	83.60	83,60	100	83,60	83,60	100
12	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	97.89	92,31	94,30	99,99	92,31	92,32
13	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	85.46	85,46	100	85,46	85,46	100
14	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	92.40	95,32	103,16	97,16	95,32	98,11
15	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	93.60	93,6	100	93,6	93,6	100
16	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	97.87	91,87	93,87	90,16	91,87	101,90
17	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	94.85	94,85	100	94,85	94,85	100
18	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	88.33	86,77	98,23	91,32	86,77	95,02
19	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	93.77	93,77	100	93,77	93,77	100
20	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	84.41	88,48	104,82	88,57	88,48	99,90
21	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	91.13	91,13	100	91,13	91,13	100

No	Program/Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Ketercapaian Akhir RPJMD (2018-2023)			Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
22	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	94.73	90,82	95,87	91,83	90,82	98,90
23	Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	96.05	94,73	98,63	94,73	94,73	100
24	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan	%	100	100	100	100	100	100
25	Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	100	117,79	117,79	100	117,79	117,79
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>							
1	Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	-	-	-	100	100	100
2	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	19.09	19,09	100	19,09	19,09	100

## b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

- 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** dengan keluaran penyambungan rumah yang terlayani SPAM perkotaan untuk 2.957.458 KK; Penyambungan rumah yang terlayani SPAM perdesaan sebanyak 3.309.148 KK; dan penyaluran 1.319 Liter debit air minum curah SPAM Regional.

Rekomendasi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2022 adalah tentang Pengelolaan Air bersih melalui kerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong, Bregas, dan Keburejo) secara bertahap, rekomendasi ini telah dilaksanakan tindak lanjut dengan dilaksanakannya Pembangunan SPAM Regional Keburejo dan Pembangunan SPAM Regional Bregas pada Tahun Anggaran 2023.

Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Keterbatasan JDU yang belum sampai ke daerah layanan; 2) Belum optimalnya kapasitas yang terserap akibat rendahnya minat masyarakat untuk memasang Sambungan Rumah; 3) Kebocoran pada pipa JDU dan pipa PDAM oftaker; 4) Keterbatasan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai sumber air baku potensial untuk pengembangan/inisiasi SPAM Regional Jawa Tengah; 5) Belum optimalnya pembinaan teknis kepada KP-SPAM dan PDAM karena keterbatasan jumlah peserta bintek untuk setiap Kabupaten/Kota; dan 6) Adanya desa/kelurahan pada Kabupaten/Kota yang masuk kategori penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) di Jawa Tengah yang memerlukan intervensi bidang air minum.

Upaya penyelesaian permasalahan di atas adalah 1) Terus meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana agar kapasitas air yang tersedia dapat sampai ke daerah layanan; 2) Sosialisasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Sambungan Rumah; 3) Melakukan perbaikan pada pipa JDU dan PDAM; 4) Mencari sumber air alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber air baku; 5) Optimalisasi pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota untuk berpartisipasi dalam Bimtek KP-SPAM dan PDAM; dan 6) Pengalokasian Dana Hibah Pembangunan Sarana Prasarana SPAM Desa.

Manfaat kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM Lintas kabupaten/kota adalah memenuhi kebutuhan pokok demi kehidupan yang sehat, berkualitas, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau melalui pembangunan air minum curah lintas kab/kota.

## 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Didukung oleh kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional dengan keluaran 6.941.376,46 KK yang rumahnya terlayani akses air limbah domestik.

Sesuai Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2022 adalah mengenai Penanganan Air Limbah Domestik, perlu menjadi salah satu konsen utama, sehingga perlunya penataan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jawa Tengah; maka berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sudah tercantum jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik yang dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Hal ini telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional pada 6 Kabupaten (Pati, Sragen, Semarang, Pekalongan, Magelang, Kendal, Temanggung, Jepara) dan 2 Kota (Pekalongan dan Magelang).

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya pembinaan teknis kepada KPP sanitasi air limbah domestik karena keterbatasan jumlah peserta bimtek untuk setiap Kabupaten/Kota. Upaya yang dilakukan yaitu optimalisasi pendampingan terhadap Kabupaten/Kota guna mencapai sanitasi layak sesuai target di tahun 2023. Manfaat kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup.

## 3) Program Penataan Bangunan Gedung

Memiliki kegiatan yakni Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dengan keluaran 157 unit bangunan sudah dilakukan pengecekan menuju fungsi baik sesuai target.

Kegiatan tersebut sesuai dengan rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2022 yaitu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan bantuan teknis Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD).

Kendala kegiatan tersebut yaitu adanya perubahan desain dan anggaran karena regulasi terkait pelestarian kawasan KSPN Borobudur serta menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Upaya kegiatan yang dilakukan yaitu optimalisasi anggaran untuk pembangunan MAJT di Kab. Magelang serta mengalokasikan anggaran pembangunan tahap selanjutnya di tahun mendatang untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan di tahun ini.

Manfaat kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi adalah terwujudnya pembangunan bangunan gedung milik pemerintah provinsi yang fungsional,

memenuhi standar teknis, proses penyelenggaraannya dilaksanakan secara efektif, efisien, serta tertib administratif.

#### 4) Program Penataan Bangunan Lingkungannya

Didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran 157 unit bangunan sudah dilakukan pemeriksaan keandalan fisik sesuai target.

Permasalahan yang dihadapi antara lain: Tersebaranya aset BGMD di 35 Kabupaten/Kota dengan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan yang dilakukan pendataan BGMD-nya dan masih banyak bangunan gedung yang mengalami penurunan laik fungsi.

Upaya penyelesaiannya adalah Digitalisasi data teknis BGMD yang diterapkan secara bertahap sesuai skala prioritas dan Melakukan pemeriksaan keandalan dan pendataan BGMD secara bertahap.

Manfaat kegiatan penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung Lingkungannya agar daerah memiliki data bangunan gedung yang pengumpulannya melalui penyelenggaraan pendataan bangunan gedung. Data bangunan gedung yang dimaksud meliputi: data umum, data teknis bangunan gedung dan data status bangunan gedung.

#### 5) Program Penyelenggaraan Jalan

Didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang memiliki keluaran panjang jalan provinsi sesuai jalan kolektor baik sepanjang 1.082,85 KM dan Panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jalan kondisi baik sesuai survey PKRMS pada akhir tahun 2023 sebesar 90,88% dari total jalan provinsi sepanjang 2.404,741 KM. Program penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan serta penggantian jembatan pada ruas jalan provinsi.

Sesuai dengan rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2022 yaitu optimalisasi anggaran untuk program Preservasi jalan dengan melakukan perencanaan kinerja, evaluasi, rehabilitasi, rekonstruksi pembangunan, pemeliharaan, peningkatan kualitas kapasitas infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya anggaran yang ada dengan prioritas Program Preservasi jalan dan berupaya untuk mengusulkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan INPRES Jalan Daerah.

Masalah yang dihadapi antara lain: Besaran penurunan kondisi permukaan jalan yang tidak diikuti dengan besaran kegiatan preservasi jalan dan Bangunan pelengkap jalan di ruas jalan provinsi Jawa Tengah belum sesuai standar.

Upaya yang dilakukan adalah Optimalisasi pekerjaan rehabilitasi jalan serta mengusulkan paket pekerjaan preservasi di jalan yang mengalami kerusakan dan Merencanakan dan membangun bangunan pelengkap jalan terutama saat melaksanakan pekerjaan rehabilitasi.

Manfaat kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi adalah meningkatkan dan mempertahankan kondisi permukaan baik jalan dan jembatan selama umur rencana jalan yang ditetapkan.

#### 6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Didukung oleh 2 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dengan keluaran peningkatan kapasitas 540 orang pelaku jasa konstruksi dan sertifikasi 1.810 orang tenaga bidang jasa konstruksi. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi dengan keluaran 3 buah informasi berupa pameran, Harga Satuan Dasar (HSD), dan buku perpustakaan.

Kegiatan tersebut sesuai dengan rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2022 yaitu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi tenaga ahli konstruksi.

Kendala yang dihadapi pada Kegiatan Penyelenggaraan SIPJAKI adalah kurangnya informasi masyarakat terkait informasi di Bidang Jasa Konstruksi sehingga upaya yang dilakukan ialah terus memberikan informasi terkait Jasa Konstruksi melalui pameran pameran, HSD melalui aplikasi MAS PETRUK dan buku perpustakaan.

Manfaat kegiatan penyelenggaraan pelatihan ahli konstruksi adalah memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran L-1.A.1.3.1

#### c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dilaksanakan melalui 6 program dan 7 kegiatan. Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10  
Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUBMCK)

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja (Program dan Kegiatan)	
		Jumlah	Rata-rata Tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata Tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3	100	3	100	100	Sangat Tinggi

No	Uraian	Indikator Kinerja Program		Indikator Kinerja Kegiatan		Kesesuaian Kinerja (Program dan Kegiatan)	
		Jumlah	Rata-rata Tingkat Ketercapaian (%)	Jumlah	Rata-rata Tingkat Ketercapaian (%)	Tingkat Kesesuaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Limbah	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
3	Program Penataan Bangunan Gedung	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
4	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1	100	1	100	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Jalan	25	100	47	100	100	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2	100	3	100	100	Sangat Tinggi

Tingkat kesesuaian antar program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya terdapat 6 program dengan tingkat ketercapaian keseluruhannya sangat tinggi yang artinya kegiatan yang dilakukan tepat dalam mendukung kinerja program.

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu:

1. Pembangunan sarpras SPAM Desa di 40 lokasi untuk mengintervensi sebagian Desa PKE melalui Hibah Pembangunan sarpras SPAM Desa;
2. Inisiasi pembangunan sarpras SPALD Regional yang akan menjadi pilot project penanganan air limbah domestik secara aman skala Regional di Provinsi Jawa Tengah;
3. Pembangunan sarana dan prasarana Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan agama Islam (Islamic Center) dan destinasi wisata religi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur;
4. Peningkatan kinerja jalan di Provinsi Jawa Tengah meliputi : Pembangunan Jalan Bandungsari-Salem, Peningkatan Jalan Sidareja-Cukangleuleus, Peningkatan Jalan Buntu-Kroya-Slarang, Peningkatan Jalan Morongso (Batas Kabupaten Tegal/Pemalang)-Tuwel-Sirampog, Peningkatan Jalan Parakan - Patean / Batas Kabupaten Kendal/Temanggung.

Peningkatan persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah dilakukan dengan penataan, pemanfaatan, pengawasan dan pembinaan teknis bangunan gedung dan lingkungannya kepada pengelola gedung serta peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi bagi tenaga di bidang konstruksi di Jawa Tengah.

Dalam rangka menjaga kualitas jalan provinsi agar sesuai standar jalan kolektor baik dilakukan upaya antara lain pembangunan, pelebaran dan rekonstruksi jalan, pembangunan dan penggantian jembatan serta pembangunan *fly over*. Percepatannya didukung oleh Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) sebagai pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN (Rupiah Murni).

Pemenuhan kapasitas akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat dilakukan pembangunan JDU pada SPAM Reg dan adanya fasilitasi Pamsimas di masing-masing kab/kota serta fasilitasi pada kelompok penerima pemanfaat untuk optimalisasi pencapaian akses sanitasi.

Peningkatan panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta panjang jembatan kondisi baik dilakukan pemeliharaan rutin serta rehabilitasi jalan dan jembatan yang didukung dengan pemanfaatan Aplikasi Jalan Cantik untuk meningkatkan peran aktif dari masyarakat.

Tabel 3.103  
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023			Tingkat Ketercapaian Kinerja terhadap RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	15,23	14,21	15,23	15,23	100,00	100,00
2	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	44,24	43,50	44,24	45,03	101,79	101,79
3	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	-	88,97	89,65	90,17	100,58	-
4	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	92,5	92,49	90,87	90,88	100,01	98,24

NO	REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ GUBERNUR JATENG TA 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH
		<p>dan pelatihan peningkatan kemampuan obsgyn.</p> <p>Adapun pelatihan pelatihan ini akan terus dilaksanakan di tahun 2024 disesuaikan dengan kompetensi tenaga kesehatan yang akan dilatih.</p>		
		<p><b>RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelatihan Gawat Darurat Maternal dan Neonatal bagi dokter umum, bidan dan perawat;</li> <li>2) Pelatihan Keperawatan Intensif;</li> <li>3) Studi banding di RS Pusat Otak Nasional tentang pelayanan unit stroke;</li> <li>4) Pelatihan BTCLS;</li> <li>5) Pelatihan ACLS dan ATLS.</li> </ol>	<p>Tenaga kesehatan semakin kompeten dan akan meningkatkan capaian SPM.</p>	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
	<p>a. Optimalisasi anggaran untuk program Preservasi jalan dengan melakukan perencanaan kinerja, evaluasi, rehabilitasi, rekonstruksi pembangunan, pemeliharaan, peningkatan kualitas, kapasitas infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Memaksimalkan sumber daya anggaran yang ada dengan prioritas Program Preservasi jalan dan berupaya untuk mengusulkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan INPRES Jalan Daerah.</p>	<p>Tercapainya indikator Program Preservasi jalan dengan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah.</p>	<p>DPUBMCK</p>
	<p>b. Meningkatkan Pelayanan Keciptakarya : Air Minum, Sanitasi dan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dan Jasa Konstruksi.</p>	<p>Mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan SPAMREG untuk Air Minum, SPALD untuk Sanitasi, Bantuan Teknis untuk Bangunan Gedung dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi</p>	<p>Terlayannya kebutuhan masyarakat atas air bersih, sanitasi lingkungan, Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) yang aman atas optimalnya kegiatan Keciptakarya dan meningkatnya tenaga kerja terampil yang profesional</p>	<p>DPUBMCK</p>
	<p>c. Perlunya melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur penataan ruang, dengan mempertimbangkan isu lingkungan dan kebijakan strategis nasional.</p>	<p>Adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengharuskan adanya perubahan kebijakan di Bidang penataan Ruang dari UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada PP No. 21 Tahun 2021 dalam Pasal 245 huruf b menjelaskan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Hal ini menjadi salah satu alasan adanya Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengintegrasikan wilayah darat dan pesisir.</p>	<p>DINAS PUSDATARU</p>

## **BAB 4**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN & PENUGASAN**

#### **4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN**

##### **4.1.1 Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat**

###### **A. Tugas Pembantuan**

###### **1. Kementerian/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan**

- a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. Kementerian Pertanian
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Kementerian Ketenagakerjaan
- f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

###### **2. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

Total anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rp310.273.008.000,00 dengan capaian realisasi fisik 99,40% dan keuangan 97,72%. Anggaran Tugas Pembantuan tersebut dikelola oleh 7 Perangkat Daerah, adapun rincian dan capaian pelaksanaan sebagai berikut:

###### **a. Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya**

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp19.959.583.000,00 dengan realisasi realisasi fisik 100% dan keuangan 99,89% untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

- 1. Program Infrastruktur Konektivitas** didukung anggaran Rp18.955.496.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,91% dilaksanakan melalui Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional alokasi, dengan keluaran: Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan sepanjang 1,21 Km di Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap; Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) sepanjang 95,59 Km di Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap; Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) sepanjang 1.821m di Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap; Preservasi Jembatan sepanjang 445,7 m di Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap; Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) sepanjang 601,4 m di Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap.
- 2. Program Dukungan Manajemen** didukung anggaran Rp1.004.087.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,57% dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu Layanan Umum dan Layanan Perkantoran.

Manfaat pelaksanaan program antara lain mempertahankan kondisi mantap pada jalan dan jembatan nasional serta mendukung program pemerintah terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi melalui padat karya untuk masyarakat setempat/sekitar ruas penanganan.

#### **b. Dinas PU Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang**

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang (DPUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah didukung alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Rp82.744.782.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,55% untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

- 1) **Program Ketahanan Sumber Daya Air** didukung anggaran Rp80.762.944.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,83% dilaksanakan melalui kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana. Keluaran kegiatan tersebut yaitu irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara sejumlah 30 jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat sepanjang 3.275,2 Km di wilayah Kabupaten (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Grobogan, Kudus, Pati, Magelang, Kebumen, Purworejo, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas).
- 2) **Program Dukungan Manajemen** didukung anggaran Rp1.981.838.000,00 dengan realisasi fisik 100% keuangan 87,16% dilaksanakan melalui kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal. Keluaran kegiatan tersebut adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu: Dokumen Laporan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal serta Dokumen Layanan Perkantoran.

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya kinerja jaringan irigasi karena masih adanya kerusakan sarpras, kurangnya pengamanan aset dan rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengguna air. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi di 30 Daerah Irigasi (DI), dan melibatkan masyarakat dalam proses pemeliharaannya. Manfaat yang diperoleh atas pelaksanaan Tugas Pembantuan yaitu terjaganya kualitas jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang ada di Jawa Tengah untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan penyerapan tenaga kerja setempat.

#### **c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Alokasi anggaran dari Kementerian Pertanian Rp108.002.250.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,35%. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Rp97.530.130.000,00 dan Ditjen Prasarana, Sarana dan Penyuluhan (PSP) Rp10.472.120.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan 3 program, yaitu:

- 1) **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** didukung anggaran Rp920.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan